

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG
MELAKUKAN SENGKETA MEDIK DI RUMAH SAKIT ORTOPEDI
PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

ZENITA ASHARON

C 100 150 187

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN

SENGKETA MEDIK DI RUMAH SAKIT ORTOPEDI

PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

Zenita Asharon

C100150187

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Rizka, S.Ag., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN
SENGKETA MEDIK DI RUMAH SAKIT ORTOPEDI**

PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA

OLEH:

**ZENITA ASHARON
C 100 150 187**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis, 18 Juli 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. **Dr. Rizka, S.Ag., M.H**
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. **Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H**
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. **Nuswardhani S.H., S.U.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

NIK. 537/NIDN. 0727085803

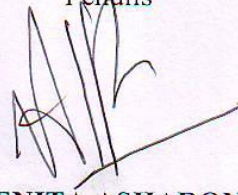
PERNYATAAN

Dengan saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Surakarta, 15 Mei 2019

Penulis



ZENITA ASHARON

C 100 150 187

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN SENKETA MEDIK DI RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA

Abstrak

Dewasa ini praktik kedokteran kembali menjadi sasaran kritikan dari berbagai kalangan masyarakat. Secara humanistik, dokter sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kelalaian dan kealpaan. Kelalaian yang terjadi pada saat menjalankan tugas profesinya inilah yang dapat mengakibatkan sengketa medis. Penelitian ini mengkaji tentang peraturan hukum yang mendasari tindakan medis antara Dokter dengan RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dan perlindungan hukum terhadap Dokter yang melakukan sengketa malpraktik medik di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam peraturan internal RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, tidak ada klausula khusus yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum dokter yang melakukan tindakan medis di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, termasuk mengenai pengaturan hukum dan sejauh mana rumah sakit melindungi hak dokter. Setiap sengketa malpraktik medis yang diadakan dokter dalam RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah tanggungjawab antara keduanya yaitu antara Dokter dan RSO Prof. Dr. R. Soeharso.

Kata Kunci : Sengketa Medis, Perlindungan Hukum, Peraturan Hukum

Abstract

Today medical practice is again subject to criticism from various circles of society. Humanistically, doctors as ordinary human beings certainly cannot be separated from negligence and neglect. It is this negligence that occurs while carrying out his professional duties which can lead to medical disputes. This study examines the legal regulations that underlie medical actions between Doctors and RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta and legal protection for Doctors who conduct medical malpractice disputes at RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. The research method used is descriptive research with a normative juridical approach. The results of this study concluded that in the internal regulations of the RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, there is no special clause describing the legal protection of doctors who carry out medical actions at the RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, including regarding legal arrangements and the extent to which hospitals protect doctors' rights. Every medical malpractice dispute held by a doctor in the RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta is the responsibility between the two, namely between Doctors and RSO Prof. Dr. R. Soeharso.

Keywords: Medical Disputes, Legal Protection, Legal Regulations

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini praktik kedokteran kembali menjadi sasaran kritikan dari berbagai kalangan masyarakat. Secara humanistik, dokter sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kelalaian dan kealpaan.¹ Keadaan tersebut dipersulit dengan pengalaman malpraktik yang dikaburkan dengan apa yang disebut dengan resiko medik. Sehingga, tidak jarang seorang dokter yang telah bekerja dengan sangat profesional, yang telah sesuai dengan standar profesi medik, standar pelayanan medis, serta *Standar Operating Procedure* (SOP) masih dituntut dengan tuduhan telah melakukan malpraktik.² Berbagai upaya perlindungan hukum dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan terhadap tindakan dokter atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan kesehatan telah dilakukan pemerintah dengan membuat dan memberlakukan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran agar terwujudnya derajat keadilan hukum yang optimal.

Keberadaan hukum kesehatan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan. Sebelumnya, rumah sakit dianggap sebagai lembaga sosial yang kebal hukum berdasarkan *doctrine of charitable immunity*, sebab menghukum rumah sakit dengan membayar ganti rugi sama artinya dengan mengurangi kualitasnya, yang artinya akan mengurangi kemampuan rumah sakit untuk menolong masyarakat. Ditambah lagi dengan tidak semua dokter yang berpraktik di rumah sakit memiliki status kepegawaian yang sama, ada beberapa rumah sakit pemerintah yang memiliki beberapa dokter yang berstatus pegawai tetap (PNS) dan ada juga yang merupakan dokter kontrak atau sebagai dokter tamu di rumah sakit tersebut. Hal ini menjadikan sebuah kesulitan dalam hal pembagian tanggung jawab, hak beserta kewajiban bagi dokter-dokter tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Peraturan hukum apa yang mendasari tindakan medis antara Dokter dan Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap dokter yang

¹ M. Iqbal Mochtar, 2009, *Dokter Juga Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 224.

² Koeswadji Hermien Hadiani, 1986, *Hukum Dan Masalah Medik*, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 79.

melakukan sengketa medik di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta?

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui peraturan hukum apa yang mendasari tindakan medis antara dokter dan Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap dokter yang melakukan sengketa medik di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wawancara terhadap Kepala Bagian Hukum dan Masyarakat Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. Dalam penelitian ini, penulis pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah dan Landasan Hukum Rumah Sakit Ortopedi Surakarta Prof.

Dr. R. Soeharto Surakarta

Keberadaan Rumah Sakit Ortopedi dari inisiatif Dr. R. Soeharso yang bekerja sebagai dokter umum pada Rumah Sakit “*Nood Hospital*” di Jebres, Surakarta. Atas izin Direktur Utama Rumah Sakit, Dr. R. Soeharso merintis kegiatan pembuatan kaki dan tangan palsu bagi para penderita cacat tubuh akibat perang kemerdekaan.³

RSO Prof. Dr. R. Soeharso ini berkembang pesat, dimulai dengan lulus akreditasi Rumah Sakit 5 (lima) pelayanan pada tahun 2000. Selanjutnya disusul dengan penetapan RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan dibidang Ortopedi Traumatologi dan Rehabilitasi Medis melalui SK Menkes dan Kesejahteraan Sosial No. 1465/Menkes-Kesos/SK/IX/2000 tanggal 29 September 2000.

³ 1998, *Buku Publikasi RSO. Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta*. Surakarta: RSO Prof. Dr. R. Soeharso, hal 1.

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 756/Menkes/Sk/IV/2007 pada tanggal 26 Juni 2007 RSO Prof Dr. R. Soeharso Surakarta ditetapkan menjadi Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Selain menjadi Rumah Sakit PPK BLU, RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta juga memperoleh perubahan status Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 256/Menkes/Per/III/2008 tertanggal 11 April 2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 839/Menkes/Per/VII/2007 tanggal 27 Juli tentang Organisasi dan Tata Kerja RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, dimana selain sebagai tempat pendidikan calon dokter spesialis bedah layanan umum dan rumah sakit kelas A.

3.2 Struktur Organisasi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta

Untuk menjalankan fungsinya, RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta berdasarkan SK Menkes No. 511 Tahun 1994, maka dibentuklah Susunan Organisasi Lini dan Staf sebagai berikut:

- 1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bagian Eselon III/b
- 2) Wakil Direktur Pelayanan, dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bidang Eselon III/b

Kegiatan pelayanan langsung diselenggarakan oleh 13 Instalasi, dibantu oleh 3 Instalasi Penunjang. Kepala Instalasi adalah Jabatan Non Struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 839/Menkes/Per/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 beserta perubahannya, struktur RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta terdiri dari:

- 1) Direktur Utama Dr.dr.Pamudji Utomp, Sp.OT(K), sejajar dengan organisasi Non-struktural, yaitu Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Pusat dengan Surat Keputusan untuk menjadi Pengawas di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. Direktur Medik dan Keperawatan
- 2) Direktur Medik dan Keperawatan
Dipimpin oleh dr.Romaniyanto, Sp.OT(K) Spine, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, membawahi:

- a. Bidang Pelayanan Medik
 - b. Bidang Pelayanan Keperawatan
 - c. Unit-Unit Non Struktural
- 3) Direktur Umum, SDM, dan Pendidikan
- Dipimpin oleh dr.R. Safil Rudiarto H, Sp.Rad. MM, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dan membawahi:
- a. Bagian Umum
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Bagian SDM
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Pemasaran
 - c. Bagian Pendidikan dan Penelitian
 - Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Kesehatan
 - Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Non-Kesehatan
 - d. Unit-Unit Non Struktural
- 4) Direktur Keuangan
- Dipimpin oleh Drs.E.C. Subur, M.Si, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, membawahi:
- a. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Data
 - b. Bagian Akuntansi
- 5) Komite Medik, Komite Etik & Hukum, Komite Keperawatan

3.3 Peraturan Hukum yang Mendasari Tindakan Medis Antara Dokter dan Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta

Peraturan hukum yang mendasari tindakan medis antara dokter dan rumah sakit, pada dasarnya harus dilihat dari bentuk rumah sakit. Dasar tersebut dilihat dari apakah rumah sakit tersebut milik pemerintah atau milik swasta. Menurut Pasa; 1 ayat (3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.02.02/I/4686/2018 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, pemilik dari RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sehingga, dokter yang bekerja di

RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil di rumah sakit pemerintah, dan memiliki hubungan hukum yang diatur menurut ketentuan Hukum Administrasi Negara (HAN). Dalam hal ini, dokter di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta tunduk sepenuhnya terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Namun, dengan tunduknya dokter terhadap Undang-Undang Kepegawaian tersebut belum membuat kejelasan sejauh mana rumah sakit ikut bertanggung jawab apabila ada tuntutan hukum dari pasien atau dokter dalam mengadakan tindakan medis melakukan kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena belum adanya kejelasan dalam hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit, kita perlu mengetahui peraturan hukum apa sajakah yang mendasari tindakan medis antara dokter dan rumah sakit.

1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Pada Pasal 1 butir 1 dan butir 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menyatakan dokter tergolong sebagai tenaga kesehatan dan RSO Ptof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dokter dalam menjalankan tindakan medisnya memerlukan sarana atau tempat. Begitu pula RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta sebagai fasilitas pelayanan kesehatan memerlukan tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Peraturan hukum yang mendasari tindakan medis antara dokter dan rumah sakit, tersirat dalam Pasal 41 dan 42. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai syarat untuk dokter mengadakan tindakan medis di rumah sakit. Jika rumah sakit tidak memberikan syarat yang dituliskan undang-undang, maka rumah sakit melakukan perbuatan melanggar hukum. Sebaliknya, jika dokter tidak memenuhi kedua pasal tersebut, maka tidak dapat mengadakan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan melakukan pelanggaran hukum.

3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Dalam Pasal 12 dan 13, menyatakan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki tenaga medis tetap yang bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.

Selain kewajiban tenaga medis, rumah sakit juga memiliki kewajiban bagi setiap tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Disebutkan juga dalam Pasal 46, bahwa setiap tenaga kesehatan, termasuk dokter yang melakukan kelalaian maupun adanya masalah dalam mengadakan tindakan medis di rumah sakit, maka rumah sakit harus bertanggung jawab secara hukum.

4) Kode Etik Rumah Sakit

Mengenai peraturan hukum yang mendasari tindakan medis antara dokter dan rumah sakit tertuang dalam Pasal 13 sampai Pasal 18, bahwa rumah sakit harus menjaga profesionalitas tenaga kesehatannya terhadap seluruh pasiennya untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan. Karena, dokter tidak menjanjikan kesembuhan pasien tetapi melalui etika profesi yang benar adalah upaya pelayanan kesehatan untuk menyembuhkan pasien. Oleh karena itu, rumah sakit bertanggung jawab atas segala tindakan medis dokter menjaga mutu pelayanan dan berpedoman terhadap standar pelayanan medik dan etika profesi yang telah disepakati.

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan hukum yang mendasari tindakan medis dokter di rumah sakit dapat dilihat dalam Pasal 20 yang mengatakan bahwa, status tenaga kesehatan dalam penempatan tenaga kesehatan dapat berupa 2, antara lain sebagai pegawai negeri atau pegawai tidak tetap. Dalam penjelasan Pasal 20 atas Peraturan Pemerintah ini, pengertian status pegawai tidak tetap antara lain pegawai bulanan, pegawai harian, pegawai honorer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pegawai tidak tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin

Kerja Apoteker, Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti, dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap.⁴

Status kepegawaian yang diatur dalam Pasal 20 tersebut memengaruhi peraturan hukum yang mendasari tindakan medis dokter di rumah sakit, karena perbedaan status kepegawaian maka berbeda pula hak dan kewajiban yang diperoleh tiap dokter dan juga oleh rumah sakit.

- 6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/4686/2018 Tentang Pemberlakuan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Pasal 1 angka 1-6, menjelaskan pemilik RSO Prof Dr. R. Soeharso adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta jabatan-jabatan yang bertanggung jawab seperti Dewan Pengawas, Direksi, dan Direktur Utama. Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 11 dan Pasal 1 angka 15-19 menjelaskan dokter-dokter apa saja yang bekerja di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat peraturan hukum yang mendasari tindakan medis antara dokter dan RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah bahwa dokter dalam mengadakan upaya pelayanan kesehatan berada di bawah Direksi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Sedangkan Direksi, berada dibawah Direktur Utama dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pemilik dari rumah sakit melalui Dewan Pengawas. Oleh karena itu, setiap tindakan medis yang dilaksanakan oleh dokter di RSO Prof. Dr. R. Soeharso tidak hanya mengikat antara dokter dengan pasien tetapi juga terhadap rumah sakit.

- 7) Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Nomor HK.02.03/xxx.2.2.2/1088/2019 tentang Komite Etik dan Hukum Periode 2019-2022 Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta

⁴ <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1996-tentang-tenaga-kesehatan-.pdf> diakses pada tanggal 3 Mei 2019 Pukul 01.20 WIB

Komite Medik ini bekerja di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama yang anggotanya terpilih dan dipandang layak memenuhi syarat sebagai Komite Etik dan Hukum. Dengan demikian, dokter dalam mengadakan tindakan medis dipantau oleh Komite Etik dan Hukum yang hasil kerjanya dipertanggung jawabkan kepada Direktur Utama berdasarkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Nomor. HK.02.03/xxx.2.2.2/1088/2019 Tentang Komite Etik dan Hukum Periode 2019-2022 RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta

3.4 Perlindungan Hukum Terhadap Dokter yang Melakukan Sengketa Malpraktik Medik di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta

Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah rumah sakit milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai institusi dibidang pelayanan kesehatan yang dalam setiap tindakan medisnya tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan oleh semua pihak yang bersangkutan. Namun, kerugian terhadap penerima pelayanan medis (pasien) yang disebabkan oleh rumah sakit melalui tenaga kesehatannya bukan merupakan tanggung jawab rumah sakit. Akan tetapi, undang-undang yang memberikan ganti kerugian tersebut kepada pasien.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵

RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta telah memberikan perlindungan hukum terhadap dokter yang bekerja disana dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan:

1) Persetujuan Tindak Medis (PTM) atau *Informed Consent*

Persetujuan Tindak Medis adalah istilah dalam Bahasa Indonesia untuk “*Informed Consent*”. Dalam istilah *Informed Consent* secara implisit telah tercakup tentang informasi dan persetujuan. Persetujuan yang diberikan

⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 133

setelah orang yang bersangkutan *informed* atau diberi informasi. Dapat dikatakan *informed consent* adalah persetujuan berdasarkan informasi.⁶

Apabila seorang dokter melakukan tindakan perawatan tanpa izin yang berarti tanpa persetujuan pasien, maka dokter tersebut melakukan suatu perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).⁷

Rumah sakit dalam proses pemberian informasi terhadap pasien, membuat rekam medik menjadi kewajiban dari dokter atau rumah sakit.⁸ Dengan dibuatnya rekam medik dapat menghindari terjadinya konflik antara dokter dengan pasien, dimana rekam medis ini mencatat dan mendokumentasikan tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik pada suatu sarana pelayanan kesehatan.⁹

Pasal 13 Permenkes Nomor. 749a/89 juncto Permenkes Nomor. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medik, diwajibkan semua fasilitas kesehatan baik rawat jalan, maupun rawat inap membuatnya karena terdapat sanksi pidana maupun denda serta sanksi administratif bagi fasilitas kesehatan yang tidak membuatnya.¹⁰

2) Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta

Komite Etik dan Hukum ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Dalam Peraturan Internal Staf Medis Pasal 69 ayat (1) mengatakan Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:

- a. Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit
- b. Memelihara mutu profesi staf medis
- c. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis

⁶ Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju, hal. 62

⁷ S. Soetrisno, 2010, *Malpraktek Medik & Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu, hal. 19

⁸ Siska Elvandari, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta: Thafa Media, hal. 156

⁹ *Ibid*, hal. 157

¹⁰ Desriza Ratman, 2012, *Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Medik Dengan Konsep Win-Win Solution*, Jakarta: Elex Medi Koputindo, hal 31.

Masa kerja Komite Etik dan Hukum adalah selama 3 tahun dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Direktur Utama paling sedikit setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.¹¹

3) Dewan Pengawas

Dewan Pengawas merupakan unit non struktural yang bersifat independent, dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan berikutnya, serta diberhentikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pada proses penyelesaian sengketa malpraktik medis, menurut keterangan Ibu Murti selaku Kepala Bagian Hukum dan Masyarakat RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada tanggal 4 Maret 2019 Pukul 13.00 WIB mengatakan bahwa belum pernah terjadi sengketa medik hingga ke ranah hukum. Namun ketika suatu saat nanti terjadi gugatan oleh pihak pasien, maka pihak rumah sakit akan meminta penyelesaian jalur kekeluargaan. Jika tidak ada kesepakatan damai, maka perkara akan diproses oleh Komite Etik dan Hukum RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.¹³

Menurut keterangan Bapak Heru sebagai Kepala Ruang Poliklinik Pelayanan Terpadu di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, pada tanggal 25 April 2019 Pukul 10.30 WIB, mengatakan permasalahan medis di dalam rumah sakit dan 1x24 jam pasca operasi. Salah satu contohnya adalah pasca operasi, lalu bagian tubuh yang telah dioperasi ternyata terdapat infeksi. Gejala yang timbul akibat adanya infeksi yaitu antara lain, pasien mengalami

¹¹ Direktur Utama RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, 2019, *Keputusan Direktur Utama RSO Prof. Dr. R. Soeharso Nomor: HK.02.03/xxx.2.2.2/1088/2019 tentang Komite Etik dan Hukum Periode 2019-2022 RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta*, Surakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hal 5.

¹² Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018, *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. HK.02.02/1/4684/2018 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta*, Surakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hal 10.

¹³ Wawancara dengan Ibu Murti tanggal 4 Maret 2019 di Kantor Kepala Bagian Hukum dan Masyarakat RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta

demam, bagian tubuh yang telah dioperasi membengkak sehingga perlu diadakan kultur oleh petugas laboratorium. Faktor utama dari infeksi pasca operasi itu sendiri dikarenakan oleh perilaku pasien. Pasca operasi, pasien akan dibawa ke bangsal untuk menjalani rawat inap selama 1x24 jam tergantung kondisi pasien. Selama dirawat di rumah sakit banyak perilaku pasien yang menyebabkan terjadinya infeksi, antara lain kurangnya kebersihan, terkontaminasi oleh lingkungan luar (seperti ada keluarga atau teman menjenguk tetapi tidak menjaga kebersihan), serta makanan dari luar yang dibawa untuk pasien tidak terjamin kebersihannya pula. Faktor lainnya adalah kurang bersihnya alat medis untuk pasien yang digunakan oleh tenaga kesehatan pada saat pembedahan yang infeksinya terjadi selama 1x24jam. Namun hal ini sangat jarang terjadi, karena biasanya infeksi pasca operasi yang dialami pasien terjadi di luar lingkungan rumah sakit (lebih dari 2x24jam).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum yang mendasari tindakan medis antara dokter dan RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta bersifat umum dan khusus. Peraturan hukum bersifat umum dibuat oleh pemerintah berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri dan berlaku untuk seluruh rumah sakit pemerintah di Indonesia. Sedangkan peraturan hukum yang bersifat khusus adalah peraturan yang dikeluarkan oleh RSO Prof. Dr. Soeharso Surakarta berdasarkan persetujuan Direktur Utama dibawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan hanya berlaku untuk setiap tindakan medis yang bersangkutan dengan semua pegawai yang bekerja dan berada di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
- 2) Dalam melindungi tenaga kesehatannya, dalam penelitian ini khususnya dokter, RSO Prof. Dr. R. Soeharso mengadakan rekam medis (*informed consent*) dan membentuk tim penyelesaian sengketa medik yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.

4.2 Saran

- 1) Dalam peraturan internal RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, tidak ada klausula khusus yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum dokter yang melakukan tindakan medis di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, termasuk mengenai pengaturan hukum dan sejauh mana rumah sakit melindungi hak dokter. Diharapkan kedepannya, terdapat pengaturan perlindungan hukum khusus dari RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta yang jelas agar masing-masing pihak mengerti hak dan kewajibannya dalam melakukan tindakan medis, khususnya antara dokter dan RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
- 2) Setiap sengketa malpraktik medis yang diadakan dokter dalam RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah tanggungjawab antara keduanya. Karena, tidak setiap sengketa malpraktik medis yang terjadi adalah tanggung jawab rumah sakit, melainkan terkadang adalah sebuah tanggung jawab etik profesi dokter. Maka untuk memperjelas sejauh mana rumah sakit dan dokter dalam mempertanggungjawabkan tindakan medisnya, perlu dibuat suatu perjanjian kerja, untuk menentukan sejauh mana rumah sakit ikut bertanggung jawab atas kesalahan medis yang dilakukan dokternya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Elvandari, Siska. 2015. *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*. Yogyakarta: Thafa Media
- Hadianti, Koeswadi Hermien. 1986. *Hukum Dan Masalah Medik*. Surabaya: Airlangga University Press
- Mochtar, M Iqbal. 2009. *Dokter Juga Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Prof. Dr. R. Soeharso. 1998. *Buku Publikasi RSO. Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta*. Surakarta: RSO
- Ratman, Desriza. 2012. *Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Medik Dengan Konsep Win-Win Solution*. Jakarta: Elex Medi Koputindo
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soetrisno, S. 2010. *Malpraktek Medik & Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu

Supriadi, Wila Chandrawila. 2001. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju

Peraturan Perundang-undangan

Direktur Utama RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 2019. *Keputusan Direktur Utama RSO Prof. Dr. R. Soeharso Nomor: HK.02.03/xxx.2.2.2/1088/2019 tentang Komite Etik dan Hukum Periode 2019-2022 RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta*. Surakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018, *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. HK.02.02/I/4684/2018 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta*. Surakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Internet

<http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1996-tentang-tenaga-kesehatan-.pdf> diakses pada tanggal 3 Mei 2019 Pukul 01.20 WIB